



Received: 22 September 2025

Reviewed: 5 November 2025

Published: 30 November 2025

THE NICENE-CONSTANTINOPOLITAN CREED AND ITS RECEPTION: HISTORICAL TRAJECTORIES AND ECCLESIOLOGICAL IMPLICATIONS IN THE INDONESIAN CONTEXT

PENGAKUAN IMAN NICEA- KONSTANTINOPEL DAN DINAMIKA PENERIMAANNYA: TINJAUAN HISTORIS DAN IMPLIKASI BAGI GEREJA-GEREJA DI INDONESIA

Pdt. Yusak Soleiman, Ph.D.¹

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta

ABSTRACT

The Nicene-Constantinopolitan Creed (325–381) stands as one of the most influential doctrinal formulations in the history of Christianity, emerging from the theological controversies of the fourth century and functioning as a key marker of orthodoxy. This article examines the historical development of the creed, with particular attention to its formulation in the Council of Nicaea and its subsequent expansion at the Council of Constantinople. Moving beyond a purely descriptive account, the study analyzes the dynamics of its reception across different ecclesial and historical

¹ Yusak Soleiman adalah pendeta Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sinode Wilayah Jawa Barat yang ditugaskan sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (STFT Jakarta). Beliau mengampuh mata kuliah Ekumenika dan Studi Kekristenan Global. Memperoleh gelar *Doctor of Philosophy* (Ph.D.) dari *Vrije Universiteit*, Negeri Belanda. Pernah menjadi Ketua STFT Jakarta dan Ketua Perhimpunan Sekolah-sekolah Tinggi Teologi di Indonesia (PERSETIA). Saat ini sebagai Kepala Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia (PDSCI), serta anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PGI.

Yusak Soleiman

Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dan Dinamika Penerimaannya

contexts. Employing a historical-theological approach, this article argues that the creed should be understood not merely as a fixed doctrinal statement but as a product of ongoing negotiation between theological reflection, ecclesial identity, and political power. The reception of the Nicene-Constantinopolitan Creed reveals patterns of both continuity and contestation, particularly in relation to communities that exist outside or at the margins of Nicene orthodoxy. The article further explores the reception of the creed within the Indonesian context, where churches have largely inherited Nicene-Constantinopolitan formulations through Western missionary and colonial traditions. It demonstrates that, while the creed is formally acknowledged in many ecclesial documents, it has not always functioned as a central object of theological reflection in the formation of Indonesian Christian identity. This raises critical questions regarding the transmission of doctrinal authority, the role of historical memory, and the need for contextual theological engagement. In conclusion, the study suggests that a critical re-examination of the Nicene-Constantinopolitan Creed is necessary, not to undermine its theological significance, but to enable a more dialogical and contextually grounded appropriation within contemporary Indonesian Christianity.

Keywords: Nicene-Constantinopolitan Creed, Reception History, Early Church Councils, Ecclesiology, Trinitarian Theology, Indonesian Christianity, Doctrinal Development, Historical Theology.

ABSTRAK

Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel (325–381) merupakan salah satu formulasi doktrinal paling berpengaruh dalam sejarah Kekristenan, yang lahir dari kontroversi teologis abad keempat dan berfungsi sebagai penanda utama ortodoksi. Artikel ini mengkaji perkembangan historis kredo tersebut, dengan perhatian khusus pada perumusannya dalam Konsili Nicea serta pengembangannya dalam Konsili Konstantinopel. Melampaui deskripsi historis semata, studi ini menganalisis dinamika penerimaannya dalam berbagai konteks gerejawi dan historis. Dengan menggunakan pendekatan historis-teologis, artikel ini berargumen bahwa kredo tersebut tidak dapat dipahami sekadar sebagai pernyataan doktrinal yang statis, melainkan sebagai hasil dari proses negosiasi yang berkelanjutan antara refleksi teologis, identitas gerejawi, dan kekuasaan politik. Penerimaan terhadap Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel menunjukkan pola kesinambungan sekaligus kontestasi, khususnya dalam relasinya dengan komunitas-komunitas Kristen yang berada di luar atau di pinggiran ortodoksi Nicea. Artikel ini juga menelaah penerimaan kredo tersebut dalam konteks Indonesia, di mana gereja-gereja pada umumnya mewarisi formulasi Nicea-Konstantinopel melalui tradisi misi dan kolonial Barat. Ditunjukkan bahwa, meskipun kredo ini diakui secara formal dalam berbagai dokumen gerejawi, ia tidak selalu menjadi objek refleksi teologis yang sentral dalam pembentukan identitas Kekristenan Indonesia. Hal ini membuka pertanyaan kritis mengenai transmisi otoritas doktrinal, peran ingatan historis, serta kebutuhan akan kontekstualisasi teologi. Sebagai penutup, artikel ini menegaskan pentingnya peninjauan ulang secara kritis terhadap Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel, bukan untuk mereduksi signifikansi teologisnya, melainkan untuk memungkinkan apropriasi yang lebih dialogis dan kontekstual dalam Kekristenan Indonesia kontemporer.

Kata-kata kunci: nicea-konstantinopel, sejarah penerimaan, eklesiologi, trinitas, kekristenan Indonesia, perkembangan doktrin.

PENDAHULUAN

Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel (325–381) merupakan salah satu formulasi doktrinal paling berpengaruh dalam sejarah Kekristenan dan berfungsi sebagai penanda utama ortodoksi

dalam tradisi gereja Timur dan Barat. Dirumuskan dalam konteks kontroversi teologis abad keempat, kredo ini lahir dari kebutuhan gereja awal untuk merumuskan batas-batas ajaran mengenai relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus di tengah perdebatan kristologis dan trinitarian yang intens. Konsili Nicea dan Konstantinopel tidak hanya menghasilkan rumusan teologis normatif, tetapi juga membentuk kerangka institusional bagi konsolidasi identitas gereja dalam relasinya dengan kekuasaan politik Kekaisaran Romawi. Dalam perkembangan selanjutnya, kredo Nicea-Konstantinopel menjadi fondasi penting dalam liturgi, teologi, dan struktur eklesiologis Kekristenan global.

Kajian akademik mengenai Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel umumnya berfokus pada konteks historis pembentukannya dan perkembangan doktrin trinitas pada abad keempat. Studi-studi klasik dalam studi kekristenan menempatkan konsili-konsili ekumenis sebagai momen kunci dalam proses konsolidasi ortodoksi dan pembentukan tradisi doktrinal gereja awal. Pendekatan ini menekankan bahwa kredo Nicea-Konstantinopel merupakan hasil dari interaksi kompleks antara perdebatan teologis, dinamika kekuasaan politik, serta kebutuhan akan kesatuan gerejawi dalam ruang kekaisaran Romawi. Dalam kerangka ini, kredo dipahami sebagai konstruksi historis yang terbentuk melalui proses negosiasi teologis dan institusional yang panjang, lebih dari semata pernyataan iman yang muncul secara spontan atau ahistoris.

Meskipun demikian, perhatian terhadap dinamika penerimaan (*reception*) kredo Nicea-Konstantinopel di luar konteks Eropa dan dunia Mediterania masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian teologi historis berfokus pada perkembangan doktrin di lingkungan gereja Barat dan Timur klasik, sementara proses transmisi dan apropriasi kredo dalam konteks gereja-gereja global—khususnya di Asia dan Afrika—belum banyak dianalisis secara sistematis. Padahal, perkembangan Kekristenan modern menunjukkan bahwa kredo Nicea-Konstantinopel tidak hanya diwariskan melalui perdebatan teologis internal, tetapi juga melalui proses misi, kolonialisasi, dan institusionalisasi gereja dalam konteks budaya yang berbeda. Perspektif sejarah penerimaan (*reception history*) menjadi penting untuk memahami bagaimana kredo ini diinterpretasikan, difungsikan, dan dinegosiasikan dalam konteks gereja-gereja non-Barat.

Konteks Indonesia menawarkan ruang analisis yang signifikan dalam hal ini. Gereja-gereja di Indonesia pada umumnya mewarisi kredo Nicea-Konstantinopel melalui tradisi misi Barat pada abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh, bersamaan dengan proses pembentukan struktur gereja dan sistem teologi yang diimpor dari Eropa. Dalam banyak kasus, kredo Nicea-Konstantinopel diakui secara formal dalam dokumen gerejawi, tata gereja, dan liturgi, tetapi tidak selalu menjadi fokus refleksi teologis yang eksplisit dalam proses pembentukan identitas gereja. Prioritas gereja-gereja muda pada masa awal pembentukannya lebih banyak diarahkan pada konsolidasi organisasi, tata ibadah, pendidikan katekisasi, dan stabilisasi komunitas, sehingga warisan doktrinal seperti kredo Nicea-Konstantinopel sering diterima sebagai bagian dari tradisi yang sudah mapan tanpa melalui proses refleksi kritis yang mendalam.

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan teologis dan eklesiologis yang penting mengenai fungsi kredo dalam konteks gereja-gereja di Indonesia. Apakah Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel berperan sebagai dasar normatif yang aktif dalam pembentukan identitas iman, ataukah lebih berfungsi sebagai simbol historis yang diwarisi secara institusional? Bagaimana kredo ini dipahami dalam relasi dengan keragaman tradisi Kristen global, khususnya komunitas non-Nicene atau non-Chalcedonian? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan teologi kontemporer yang menekankan pentingnya dialog, kontekstualisasi, dan refleksi kritis terhadap warisan doktrinal gereja.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel serta dinamika penerimaannya dalam konteks gereja-gereja di Indonesia dengan

menggunakan pendekatan historis-teologis dan perspektif sejarah penerimaan (*reception history*). Argumen utama yang diajukan adalah bahwa kredo Nicea-Konstantinopel tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dokumen doktrinal yang statis, melainkan sebagai konstruksi historis yang terus mengalami reinterpretasi dalam berbagai konteks gerejawi dan kultural. Dalam konteks Indonesia, penerimaan kredo ini cenderung bersifat institusional dan liturgis, sementara refleksi teologis yang kritis terhadap makna historis dan eklesiologisnya masih relatif terbatas.

Struktur artikel ini disusun secara sistematis. Bagian pertama membahas latar belakang historis Konsili Nicea dan Konstantinopel serta perkembangan teologis kredo Nicea-Konstantinopel. Bagian kedua menelaah dinamika penerimaan kredo dalam sejarah Kekristenan, dengan menyoroti relasi antara doktrin, kekuasaan, dan identitas gerejawi. Bagian ketiga menganalisis penerimaan kredo dalam konteks gereja-gereja di Indonesia melalui kajian dokumen sinodal dan tata gereja awal. Bagian terakhir menguraikan implikasi teologis dan eklesiologis dari temuan tersebut bagi refleksi gereja-gereja di Indonesia dalam konteks Kekristenan global kontemporer.

PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel

Pengakuan Iman Nicea (325) lahir dalam konteks kontroversi teologis dan fragmentasi Kekristenan pada abad keempat, khususnya dalam perdebatan mengenai relasi antara Bapa dan Anak yang dipicu oleh ajaran Arianisme. Konsili Nicea tidak hanya merupakan forum teologis, tetapi juga sebuah peristiwa politik dan diplomatik yang memiliki implikasi luas bagi stabilitas Kekaisaran Romawi. Dalam situasi ini, pengakuan Nicea dapat dipahami sebagai sebuah akta politik sekaligus teologis, yang berfungsi untuk merumuskan ortodoksi sekaligus menjaga kesatuan imperium di tengah potensi disintegrasi.

Kaisar Konstantinus melihat bahwa kontroversi teologis dalam wilayah kekaisaran merupakan salah satu unsur disintegrasi yang berbahaya bagi stabilitas politik. Bagi kekaisaran, kesatuan agama dan kesatuan politik memiliki hubungan yang erat, karena setiap imperium membutuhkan simbol budaya atau agama yang dapat berfungsi sebagai pusat pemersatu. Dalam konteks tersebut, Kekristenan secara bertahap diintegrasikan ke dalam struktur kekaisaran, sehingga dapat dikatakan bahwa kekaisaran “membaptiskan dirinya” menjadi Kristen.² Konsili Nicea dengan demikian merupakan keputusan strategis dari seorang politisi yang memahami bahwa kesatuan teologis dapat berfungsi sebagai fondasi kesatuan politik dan sosial dalam wilayah kekaisaran.

Tidak berlebihan apabila Konsili Nicea disebut sebagai *ecumenical council*, karena konsili ini melibatkan perwakilan gereja dari berbagai wilayah kekaisaran dan bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan doktrinal yang bersifat universal. Sebagai konsili ekumenis pertama, Nicea menjadi model bagi konsili-konsili berikutnya dalam merumuskan ortodoksi dan membangun kesatuan gereja. Dalam perkembangan selanjutnya, semangat ekumenis yang lahir dari konsili ini terus memengaruhi gereja-gereja tradisional, terutama dalam upaya membangun kesatuan iman dan struktur gerejawi dalam skala global.

Dinamika ini juga terlihat dalam perkembangan gereja-gereja muda dan *new emerging churches*. Dalam banyak kasus, gereja-gereja baru yang berhasil melewati masa formatif pertama—sekitar dua puluh lima tahun, yaitu tahap bertahan dan menyingkirkan unsur-unsur subversif—dan masa formatif kedua—sekitar lima puluh tahun, yaitu tahap berkembang dan menjadi mapan—

² Mark Edwards, “The First Council of Nicaea and the Making of Nicene Christianity,” in *The Cambridge History of Christianity, Volume 1: Origins to Constantine*, ed. Margaret M. Mitchell and Frances M. Young (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 365–387

Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dan Dinamika Penerimaannya

cenderung merapat pada lembaga-lembaga ekumenis. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa semangat ekumenis yang lahir dari tradisi konsili awal tetap memiliki relevansi dalam perkembangan gereja modern, termasuk dalam konteks gereja-gereja di Asia dan Indonesia. Pengakuan iman Nicea dalam hal ini berfungsi sebagai simbol kesatuan historis yang menghubungkan gereja-gereja muda dengan tradisi gereja universal.

Perkembangan dari Pengakuan Nicea (325) menuju Pengakuan Nicea-Konstantinopel (381) menunjukkan bahwa kredo tidak bersifat statis, tetapi mengalami revisi, penambahan, dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan teologis dan gerejawi. Konsili Konstantinopel memperluas rumusan Nicea, terutama dalam doktrin Roh Kudus, eklesiologi, dan eskatologi, serta menghapus bagian anathemas yang sebelumnya ditujukan secara eksplisit terhadap Arianisme.³ Perbedaan tersebut dapat dilihat secara sistematis dalam tabel berikut.

SUBYEK	NICEA 325	KONSTANTINOPEL 381
Allah sang Bapa	<i>Maker of all things visible/invisible</i>	<i>Maker of heaven and earth</i>
Yesus Kristus	<i>Detailed divinity, 'begotten not made'</i>	<i>Adds 'before all ages,' expands narrative</i>
Maria Perawan	<i>Not mentioned</i>	<i>Explicitly included</i>
Penyaliban dan Kebangkitan	<i>Briefly mentioned</i>	<i>Expanded with 'under Pontius Pilate' & 'according to the Scriptures'</i>
Roh Kudus	<i>Mentioned briefly</i>	<i>Fully developed theology: 'Lord and giver of life,' 'spoken through prophets'</i>
Gereja dan Baptisan	<i>Not included</i>	<i>Added: 'one holy Catholic and apostolic Church,' 'one baptism'</i>
Kebangkitan dan Kehidupan Kekal	<i>Not included</i>	<i>Added: 'resurrection of the dead,' 'life of the world to come'</i>
Anathemas	<i>Explicitly condemns Arianism</i>	<i>Removed from the creed text</i>

Dinamika Penerimaan Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dalam Kekristenan Global

Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel tidak dapat dipahami hanya sebagai hasil dari dua konsili ekumenis pada abad keempat, melainkan sebagai bagian dari proses panjang penerimaan dan konsolidasi doktrin dalam sejarah Kekristenan global. Sejak perumusannya pada tahun 325 dan penyempurnaannya pada tahun 381, kredo ini mengalami berbagai bentuk penerimaan, penafsiran, dan bahkan penolakan dalam komunitas-komunitas Kristen yang berbeda. Dinamika penerimaan tersebut menunjukkan bahwa kredo Nicea-Konstantinopel bukan sekadar dokumen teologis yang statis, tetapi merupakan bagian dari proses historis yang melibatkan interaksi antara teologi, kekuasaan politik, dan identitas gerejawi.

Dalam konteks Kekaisaran Romawi, penerimaan kredo Nicea-Konstantinopel tidak terjadi secara langsung dan seragam. Kontroversi Arianisme dan berbagai bentuk teologi anti-Nicene terus berlangsung selama beberapa dekade setelah Konsili Nicea, bahkan hingga akhir abad keempat. Konsili Konstantinopel tahun 381 pada dasarnya merupakan upaya untuk mempertegas kembali ortodoksi Nicene serta menstabilkan struktur doktrinal gereja dalam situasi yang masih penuh perdebatan. Dengan dukungan kekaisaran, kredo Nicea-Konstantinopel secara bertahap memperoleh legitimasi sebagai standar ortodoksi, terutama setelah Kekristenan menjadi agama resmi negara pada masa Kaisar Theodosius I. Proses ini menunjukkan bahwa penerimaan kredo tidak hanya ditentukan oleh argumentasi teologis, tetapi juga oleh mekanisme institusional dan politik yang membentuk batas-batas ortodoksi gereja.

³ Philip Schaff and Henry Wace, eds., *Nicene and Post-Nicene Fathers*, Second Series, Vol. 4

Dalam perkembangan selanjutnya, kredo Nicea-Konstantinopel menjadi fondasi bagi tradisi gereja Timur dan Barat, meskipun dengan penekanan yang berbeda. Gereja Timur mempertahankan teks Konstantinopel 381 sebagai bentuk resmi kredo, sementara gereja Barat secara bertahap menambahkan unsur *filioque* dalam bagian tentang Roh Kudus, yang kemudian menjadi salah satu sumber perbedaan teologis antara kedua tradisi tersebut. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa penerimaan kredo tidak selalu identik dengan keseragaman doktrin, melainkan sering kali melibatkan proses reinterpretasi yang dipengaruhi oleh konteks teologis dan kultural masing-masing wilayah.⁴ Dengan demikian, kredo Nicea-Konstantinopel berfungsi sebagai simbol kesatuan sekaligus sebagai ruang kontestasi dalam sejarah Kekristenan.

Selain itu, tidak semua komunitas Kristen menerima kredo Nicea-Konstantinopel sebagai standar normatif. Gereja-gereja non-Chalcedonian di Timur Tengah dan Afrika, seperti tradisi Koptik, Siria, dan Armenia, mengembangkan jalur teologis yang berbeda meskipun tetap berakar pada tradisi konsili awal.⁵ Dalam konteks ini, kredo Nicea-Konstantinopel sering dipahami sebagai produk dari arus utama Kekristenan kekaisaran, sementara komunitas-komunitas lain mempertahankan tradisi teologis yang berkembang di luar struktur kekuasaan Romawi. Fenomena ini menunjukkan bahwa sejarah penerimaan kredo selalu terkait dengan relasi antara ortodoksi dan marginalitas, antara pusat kekuasaan dan komunitas-komunitas yang berada di pinggiran struktur gerejawi global.

Dalam perspektif sejarah penerimaan, kredo Nicea-Konstantinopel juga mengalami transformasi fungsi dari dokumen konsili menjadi teks liturgis dan simbol identitas iman. Sejak abad pertengahan, kredo ini secara luas digunakan dalam liturgi gereja, terutama dalam perayaan Ekaristi, sehingga berfungsi sebagai sarana pembentukan identitas komunitas Kristen. Fungsi liturgis ini memperluas makna kredo dari sekadar pernyataan doktrin menjadi praktik iman yang dihidupi secara kolektif oleh jemaat. Dengan demikian, kredo tidak hanya menjadi teks teologis, tetapi juga menjadi bagian dari memori liturgis yang membentuk kesadaran historis dan identitas gereja.

Dalam konteks Kekristenan modern dan global, dinamika penerimaan kredo Nicea-Konstantinopel semakin kompleks seiring dengan perkembangan gerakan ekumenis dan teologi kontekstual. Berbagai lembaga ekumenis internasional menempatkan kredo Nicea-Konstantinopel sebagai salah satu simbol kesatuan iman Kristen, sekaligus membuka ruang dialog dengan tradisi-tradisi teologis yang berbeda. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kredo tidak lagi dipahami secara eksklusif sebagai alat pemurnian doktrin, tetapi juga sebagai titik temu bagi refleksi teologis lintas tradisi. Dalam kerangka ini, kredo Nicea-Konstantinopel berfungsi sebagai warisan bersama yang dapat ditafsirkan secara dialogis dalam konteks Kekristenan global yang semakin plural.

Dinamika penerimaan dalam Kekristenan global ini menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana kredo Nicea-Konstantinopel kemudian diwariskan ke berbagai wilayah di luar Eropa, termasuk Asia dan Indonesia.⁶ Proses transmisi melalui misi, kolonialisasi, dan institusionalisasi gereja menunjukkan bahwa kredo tidak hanya bergerak melalui jalur teologi akademik, tetapi juga melalui struktur gereja dan praktik liturgis yang dibawa oleh tradisi Barat. Oleh karena itu, untuk memahami penerimaan kredo dalam konteks Indonesia, perlu terlebih dahulu ditelusuri bagaimana kredo Nicea-Konstantinopel hadir dalam konteks misi dan

⁴ A. Edward Sicienski, *The Filioque: History of a Doctrinal Controversy*, Oxford Studies in Historical Theology (New York: Oxford University Press, 2010).

⁵ John Meyendorff, *Imperial Unity and Christian Divisions: The Church 450–680 A.D.* (Crestwood, NY: St Vladimir's Seminary Press, 1989).

⁶ Andrew F. Walls, *The Missionary Movement in Christian History: Studies in the Transmission of Faith* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1996).

Yusak Soleiman

Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dan Dinamika Penerimaannya

kekristenan kolonial, khususnya dalam tradisi *Gereformeerd* yang beroperasi melalui jaringan VOC dan gereja-gereja Eropa di Nusantara.

Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dalam Era VOC dan Pra-Indonesia

Penerimaan Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah Kekristenan Eropa, khususnya tradisi *Gereformeerd* di Republik Tujuh Propinsi Belanda pada abad keenam belas hingga ketujuh belas. Dalam tradisi *Gereformeerd*, kredo-kredo ekumenis—termasuk Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel, dan Pengakuan Iman Athanasius—diakui sebagai bagian dari warisan gereja universal yang melengkapi dokumen-dokumen pengakuan iman Reformasi. Tiga dokumen utama yang dikenal sebagai *Three Forms of Unity*—*Nederlandse Geloofsbelijdenis*, *Heidelbergse Catechismus*, dan *Dordtse Leerregels*—dipahami sebagai rangkuman sistematis ajaran Alkitab, sementara kredo-kredo ekumenis berfungsi sebagai penghubung historis dengan tradisi gereja awal.⁷

Dalam kerangka teologi *Gereformeerd*, penerimaan kredo Nicea-Konstantinopel tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari struktur teologis yang menegaskan kesinambungan antara gereja Reformasi dan gereja purba.⁸ Dengan demikian, kredo Nicea-Konstantinopel tidak hanya dipandang sebagai dokumen sejarah, tetapi sebagai simbol kesatuan iman gereja sepanjang zaman yang memiliki otoritas teologis dalam kerangka ortodoksi Protestan. Perspektif ini kemudian menjadi dasar bagi transmisi kredo ke wilayah-wilayah misi di luar Eropa, termasuk Asia dan Nusantara, melalui aktivitas gereja dan lembaga kolonial Belanda.

Kehadiran *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dalam wilayah Nusantara membawa serta struktur gereja *Gereformeerd* sebagai bagian dari sistem kolonial yang lebih luas. Dalam konteks ini, kredo Nicea-Konstantinopel diwariskan tidak melalui perdebatan teologis lokal, tetapi melalui sistem institusional gereja yang dibangun oleh kekuasaan kolonial. Gereja di wilayah VOC berfungsi sebagai perpanjangan dari gereja di Republik Tujuh Propinsi, sehingga dokumen-dokumen pengakuan iman yang berlaku di Eropa secara otomatis diterapkan juga di wilayah kolonial. Hal yang sama berlaku dalam jaringan *West-Indische Compagnie* (WIC) di wilayah Amerika dan Karibia, yang menunjukkan bahwa kredo Nicea-Konstantinopel menjadi bagian dari sistem teologi global yang dibawa oleh ekspansi kolonial Eropa.

Dalam konteks Nusantara, proses ini menghasilkan pola penerimaan kredo yang bersifat institusional dan administratif. Gereja-gereja yang dibentuk dalam sistem VOC tidak mengembangkan kredo Nicea-Konstantinopel melalui refleksi teologis lokal, melainkan menerima kredo tersebut sebagai bagian dari struktur gereja yang sudah mapan. Dengan kata lain, kredo hadir sebagai warisan teologis yang dibawa dari pusat kekuasaan gereja di Eropa, bukan sebagai hasil pergumulan teologis komunitas Kristen lokal. Pola ini kemudian membentuk karakter awal Kekristenan di Nusantara, di mana pengakuan iman lebih dipahami sebagai bagian dari tata gereja dan liturgi daripada sebagai objek refleksi teologis yang mandiri.

Jejak historis dari proses ini masih dapat ditemukan dalam banyak gereja di Indonesia yang memiliki hubungan genealogis dengan tradisi *Gereformeerd*. Pengakuan Iman Rasuli, Nicea-Konstantinopel, dan Athanasius tetap menjadi bagian dari dokumen resmi gereja, baik dalam tata

⁷ Pengakuan Iman Belanda: Disusun oleh Guido de Brès (1561), pengakuan iman ini menjelaskan inti dari iman *Gereformeerd*, dengan penekanan pada ajaran Alkitab sebagai Firman Allah dan keharusan kelahiran baru. Katekismus Heidelberg: Katekismus ini (1563), adalah buku ajar dalam bentuk tanya-jawab, dimaksudkan untuk mendidik umat beriman dalam ajaran *Gereformeerd*, dengan penekanan khusus pada penghiburan yang ditawarkan oleh iman. Doktrin Dordrecht: merupakan keputusan Sinode Dordrecht (1618-1619), merupakan tanggapan terhadap pandangan Remonstrants dan menekankan kedaulatan Allah dan pemilihan.

⁸ Jan S. Aritonang & Karel A. Steenbrink (eds.), *A History of Christianity in Indonesia* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2008).

Yusak Soleiman

Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dan Dinamika Penerimaannya

gereja maupun dalam praktik liturgi. Hal ini menunjukkan bahwa kredo Nicea-Konstantinopel telah menjadi bagian dari memori institusional gereja-gereja di Indonesia sejak masa kolonial, meskipun tingkat refleksi teologis terhadap kredo tersebut bervariasi dalam setiap konteks gereja.

Dengan demikian, era VOC dan pra-Indonesia dapat dipahami sebagai fase awal penerimaan kredo Nicea-Konstantinopel dalam konteks Nusantara, di mana kredo tersebut hadir sebagai bagian dari sistem teologi dan struktur gereja yang diimpor dari Eropa. Fase ini menegaskan bahwa penerimaan kredo di Indonesia tidak bermula dari proses teologis internal komunitas lokal, melainkan dari transmisi institusional melalui jaringan kolonial dan misi gereja Barat. Pemahaman ini menjadi penting sebagai landasan untuk menelaah bagaimana kredo Nicea-Konstantinopel kemudian diterima dan difungsikan dalam tata gereja awal di Indonesia setelah munculnya gereja-gereja nasional pada abad kedua puluh.

Penerimaan Dalam Tata Gereja Awal di Indonesia

Penerimaan Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dalam konteks gereja-gereja di Indonesia dapat ditelusuri secara lebih konkret melalui dokumen tata gereja dan keputusan sinode awal yang muncul pada paruh pertama abad kedua puluh. Periode ini merupakan fase penting dalam sejarah Kekristenan di Indonesia, karena gereja-gereja lokal mulai membentuk struktur organisasi, identitas teologis, dan sistem liturgi yang relatif mandiri setelah melewati masa kolonial. Dalam konteks ini, kredo Nicea-Konstantinopel hadir sebagai bagian dari warisan teologis yang diwarisi dari tradisi *Gereformeerd*, tetapi tingkat perhatian terhadapnya dalam persidangan sinode awal menunjukkan dinamika yang menarik.

Dokumen Proto-Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) tahun 1948 memberikan salah satu contoh yang cukup jelas mengenai penerimaan kredo Nicea-Konstantinopel dalam tata gereja awal. Dalam Tata Gereja 1948, pasal mengenai pengakuan gereja menegaskan bahwa gereja, dalam ketaatan kepada Kitab Suci dan dipimpin oleh Roh Kudus, mengakui Yesus Kristus sebagai dasar iman sesuai dengan 1 Korintus 3:11, serta mengembangkan pengakuan iman gereja sepanjang zaman sebagaimana dirumuskan dalam simbol-simbol ekumenis, yaitu Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea, dan Pengakuan Iman Athanasius, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam kesaksian iman Reformasi. Dokumen ini juga memuat teks ketiga pengakuan iman tersebut sebagai lampiran, termasuk versi Nicea-Konstantinopel dalam tradisi gereja Barat yang memuat unsur filioque. Kehadiran kredo dalam tata gereja ini menunjukkan bahwa GPIB secara eksplisit menempatkan kredo Nicea-Konstantinopel sebagai bagian dari fondasi teologis gereja, sekaligus sebagai warisan universal yang harus dipertahankan dalam kehidupan gerejawi.⁹

Berbeda dengan GPIB, dinamika penerimaan pengakuan iman dalam Gereja Toraja menunjukkan proses yang lebih kontekstual dan pragmatis. Sinode pertama Gereja Toraja pada tahun 1947 tidak secara khusus membahas pengakuan iman, yang menunjukkan bahwa isu tersebut belum menjadi prioritas utama dalam tahap awal pembentukan gereja. Baru pada sidang sinode IV tahun 1953 muncul pembahasan mengenai pengakuan iman dalam konteks praktik liturgi

⁹ Proto-synode GPIB, 1948, bijlage VI, h. 174-176: Tata Gereja 1948, pasal III: Pengakuan Geredja : In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, geleid door de Heilige Geest belijdt de Kerk als haar fundament Jezus Christus naar het woord van 1 Cor. 3:11, luidende 'Want een andere grondslag, dan die er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen'. De aan de Kerk opgedragen invouwing deze belijdenis der Kerk van alle eeuwen, gelijk deze in de oecumenische symbolen (de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius) is samengevat en door het reformatorisch geloofsgetuigenis nader is verklaar ... (teks van de drie belijdenissen: bijlage 3, ternyata Nicea-Konstantinopel versi Gereja Barat dengan filioque)

pemakaman, khususnya terkait pembacaan Dua Belas Perkara Iman Masehi di kuburan.¹⁰ Perdebatan yang terjadi dalam sidang sinode tersebut berakhir dengan voting yang menghasilkan keputusan bahwa Pengakuan Iman Rasuli tidak dibacakan di kuburan. Kasus ini menunjukkan bahwa perhatian gereja terhadap pengakuan iman lebih berkaitan dengan praktik liturgis dan kebutuhan pastoral daripada refleksi teologis sistematis terhadap kredo sebagai dokumen doktrinal.

Fenomena serupa dapat ditemukan dalam perkembangan awal gereja-gereja di Jawa Timur, khususnya dalam sinode pertama THKTKH tahun 1954 dan beberapa sidang awal Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jawa Timur. Dalam berbagai persidangan sinode tersebut, pembahasan lebih banyak diarahkan pada tata ibadah, struktur organisasi, bahan katekisasi, proses pengambilan keputusan, dan penyusunan buku nyanyian gereja. Pengakuan iman tidak menjadi topik utama pembahasan, yang menunjukkan bahwa kredo Nicea-Konstantinopel maupun pengakuan iman lainnya dianggap sebagai bagian dari tradisi yang sudah jelas dan tidak memerlukan perdebatan khusus. Situasi ini mencerminkan prioritas gereja-gereja muda yang lebih berfokus pada konsolidasi kelembagaan dan stabilisasi komunitas daripada pada perumusan ulang doktrin.

Dalam konteks Maluku, Proto-Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) tahun 1935 dan Tata Gereja 1937 juga tidak menunjukkan pembahasan khusus mengenai pengakuan iman. Ketidadaan diskursus eksplisit mengenai kredo dalam dokumen awal ini menunjukkan bahwa pengakuan iman diterima sebagai bagian dari tradisi gereja yang diwarisi dari struktur *Gereformeerd* sebelumnya, tanpa memerlukan legitimasi teologis tambahan melalui perdebatan sinodal. Pola penerimaan seperti ini memperlihatkan bahwa kredo Nicea-Konstantinopel berfungsi lebih sebagai bagian dari kontinuitas historis daripada sebagai objek refleksi teologis yang aktif.

Situasi yang relatif berbeda dapat dilihat dalam Tata Gereja pertama Gereja Kristen Jawa (GKJ) tahun 1932. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kredo Nicea-Konstantinopel, dokumen *kerkorde* tersebut menegaskan bahwa Katekismus Heidelberg wajib dipegang oleh para pejabat gerejawi dan warga gereja, serta bahwa pengakuan iman dapat digunakan dalam liturgi sebagai alternatif pembacaan Hukum Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan iman tetap memiliki tempat dalam struktur liturgi dan pendidikan gereja, meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam bentuk kredo ekumenis tertentu. Sementara itu, Tata Gereja pertama Gereja Kristen Pasundan (GKP) tahun 1934 juga tidak memuat pembahasan khusus mengenai pengakuan iman, yang kembali menegaskan bahwa kredo lebih dipahami sebagai warisan teologis yang diterima secara implisit.

Secara keseluruhan, dokumen-dokumen tata gereja awal di Indonesia menunjukkan pola penerimaan yang relatif konsisten. Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel diakui sebagai bagian dari tradisi gereja universal, tetapi tidak selalu menjadi objek pembahasan teologis yang eksplisit dalam persidangan sinode awal. Fokus gereja-gereja muda lebih banyak diarahkan pada pembentukan struktur organisasi, tata ibadah, pendidikan iman, dan stabilisasi komunitas, sehingga kredo berfungsi terutama sebagai simbol kontinuitas historis dan identitas gerejawi yang diwarisi dari tradisi sebelumnya.

Pola penerimaan ini membuka ruang analisis yang lebih mendalam mengenai prioritas teologis dan eklesiologis gereja-gereja muda di Indonesia. Ketidadaan diskursus eksplisit mengenai kredo dalam banyak dokumen sinodal awal tidak serta-merta menunjukkan penolakan terhadap pengakuan iman, tetapi lebih mencerminkan strategi gerejawi yang menempatkan konsolidasi kelembagaan dan kebutuhan pastoral sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, langkah berikutnya

¹⁰ Sinode pertama Gereja Toraja, 1947 tidak ada pembahasan mengenai pengakuan iman. Pada sidang sinode IV, 1953 terdapat pembahasan mengenai pengakuan iman, karena terjadi perdebatan atas pembacaan 12 Perkara Iman Masehi pada acara pemakaman di kuburan. Terjadi voting: 8 tidak setuju, 5 setuju, 1 abstain, sehingga sinode GT memutuskan untuk Pengakuan Iman Rasuli “ta’ dibatja dikubur”

Yusak Soleiman

Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dan Dinamika Penerimaannya

adalah menganalisis secara historis dan teologis apakah fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk keluwesan gereja-gereja muda dalam hal pengakuan iman atau sebagai indikasi dari model penerimaan doktrin yang bersifat institusional dan pragmatis.

Analisis Historis terhadap Prioritas Gereja-gereja Indonesia

Fenomena terbatasnya pembahasan eksplisit mengenai Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dalam tata gereja dan persidangan sinode awal gereja-gereja di Indonesia memerlukan analisis historis yang lebih mendalam. Ketidadaan diskursus teologis yang intens terhadap kredo dalam dokumen-dokumen awal tidak dapat secara sederhana ditafsirkan sebagai bentuk pengabaian terhadap warisan doktrinal gereja, melainkan harus dipahami dalam konteks historis pembentukan gereja-gereja muda yang sedang menghadapi berbagai tantangan struktural, pastoral, dan institusional. Dalam periode 1930-an hingga 1950-an, gereja-gereja di Indonesia berada dalam fase transisi dari struktur kolonial menuju gereja nasional yang mandiri, sehingga prioritas utama lebih diarahkan pada konsolidasi organisasi dan stabilisasi komunitas iman.

Dalam kerangka sejarah gereja, situasi seperti ini bukanlah fenomena yang unik. Gereja-gereja yang berada dalam tahap formatif awal umumnya menempatkan perhatian pada pembentukan struktur kelembagaan, tata ibadah, pendidikan iman, dan kepemimpinan gerejawi sebelum memasuki tahap refleksi teologis yang lebih sistematis. Pengakuan iman, terutama kredo-kredo ekumenis seperti Nicea-Konstantinopel, sering kali diterima sebagai bagian dari tradisi yang sudah mapan dan tidak memerlukan perdebatan ulang dalam tahap awal pembentukan gereja. Dengan kata lain, kredo berfungsi sebagai warisan teologis yang memberikan legitimasi historis dan kontinuitas eklesiologis, sementara energi gereja diarahkan pada pembangunan komunitas yang stabil dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, prioritas tersebut dapat dipahami sebagai respons terhadap situasi sosial dan politik yang kompleks pada masa transisi menuju kemerdekaan dan awal pembentukan negara modern. Gereja-gereja yang baru berdiri harus menghadapi tantangan organisasi, hubungan dengan pemerintah, pendidikan teologi, serta kebutuhan pastoral jemaat yang tersebar di berbagai wilayah. Dalam situasi seperti ini, pengesahan atau perdebatan ulang terhadap pengakuan iman ekumenis tidak menjadi kebutuhan mendesak, karena kredo sudah diterima sebagai bagian dari tradisi gereja universal yang diwarisi dari masa sebelumnya. Oleh karena itu, minimnya pembahasan kredo dalam persidangan sinode awal lebih mencerminkan prioritas pragmatis daripada sikap teologis yang disengaja.

Fenomena ini juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk keluwesan gereja-gereja muda dalam memahami fungsi pengakuan iman. Alih-alih menjadikan kredo sebagai batas doktrinal yang kaku, gereja-gereja di Indonesia tampaknya lebih menempatkan pengakuan iman dalam kerangka kehidupan gerejawi yang kontekstual dan pastoral. Pengakuan iman tidak selalu diposisikan sebagai dokumen normatif yang harus diperdebatkan secara sistematis, tetapi sebagai bagian dari tradisi yang hidup dalam liturgi, katekisasi, dan praktik iman sehari-hari. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa penerimaan kredo tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk diskursus teologis formal, tetapi dapat berlangsung melalui praktik gerejawi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pola penerimaan yang bersifat institusional dan implisit juga menimbulkan sejumlah pertanyaan teologis dan eklesiologis. Ketika kredo diterima tanpa refleksi kritis yang mendalam, terdapat kemungkinan bahwa warisan doktrinal gereja hanya berfungsi sebagai simbol formal tanpa menjadi bagian dari kesadaran teologis komunitas. Situasi ini dapat menghasilkan jarak antara dokumen teologis dan kehidupan iman jemaat, di mana pengakuan iman tetap diakui secara resmi tetapi tidak selalu menjadi dasar refleksi teologi kontekstual. Dalam jangka panjang,

Yusak Soleiman

Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dan Dinamika Penerimaannya

kondisi seperti ini dapat memengaruhi cara gereja memahami otoritas doktrin dan relasinya dengan tradisi teologis global.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah minimnya diskursus mengenai Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dalam gereja-gereja di masa-masa awal Indonesia menunjukkan keluasan teologis atau justru menunjukkan dominasi warisan teologi Barat yang diterima secara institusional tanpa proses apropriasi kritis? Kedua kemungkinan ini tidak harus dipertentangkan secara mutlak, karena keduanya dapat hadir secara bersamaan dalam proses sejarah gereja. Di satu sisi, gereja-gereja di awal masa kemerdekaan menunjukkan fleksibilitas dalam menentukan prioritas pastoral dan organisasi; di sisi lain, mereka tetap berada dalam kerangka teologi yang diwarisi dari tradisi Barat. Dengan demikian, penerimaan kredo Nicea-Konstantinopel dalam konteks Indonesia dapat dipahami sebagai proses yang bersifat dialektis antara kontinuitas tradisi dan kebutuhan kontekstual.

Analisis historis ini membuka ruang bagi refleksi teologis yang lebih luas mengenai fungsi pengakuan iman dalam kehidupan gereja di Indonesia. Pengakuan iman tidak hanya berfungsi sebagai warisan historis, tetapi juga sebagai titik awal bagi dialog teologis yang lebih kritis dan kontekstual dalam menghadapi tantangan Kekristenan modern. Oleh karena itu, bagian berikutnya akan menguraikan refleksi teologis dan eklesiologis yang dapat dikembangkan dari dinamika penerimaan Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel, khususnya dalam konteks gereja-gereja di Indonesia yang hidup dalam realitas pluralisme, dialog ekumenis, dan perkembangan teologi kontemporer.

Tujubelas-abad Setelah Pengakuan Iman Nicea: Sebuah Refleksi

Dinamika penerimaan Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dalam sejarah gereja global dan dalam konteks Indonesia membuka ruang bagi refleksi teologis yang lebih kritis mengenai fungsi kredo dalam kehidupan gereja kontemporer. Kredo Nicea-Konstantinopel tidak hanya merupakan dokumen historis yang menandai ortodoksi gereja awal, tetapi juga merupakan warisan teologis yang terus memengaruhi cara gereja memahami identitas iman, batas doktrin, dan relasi dengan tradisi Kristen lainnya. Dalam konteks gereja-gereja di Indonesia yang hidup dalam realitas pluralisme dan perkembangan teologi global, refleksi terhadap kredo ini menjadi penting untuk menilai kembali fungsi pengakuan iman dalam pembentukan kehidupan gerejawi.

Salah satu pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel harus dipahami terutama sebagai instrumen pemurnian ajaran dan pembentukan pagar-pembatas doktrin. Secara historis, kredo ini memang lahir dalam konteks kontroversi teologis yang menuntut kejelasan batas ortodoksi, khususnya dalam perdebatan mengenai relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam kerangka ini, kredo berfungsi sebagai alat untuk menjaga kemurnian ajaran dan mencegah fragmentasi teologis yang berpotensi mengganggu kesatuan gereja. Namun, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa penggunaan kredo sebagai pagar doktrinal sering kali juga menghasilkan eksklusi terhadap komunitas-komunitas Kristen yang memiliki perbedaan teologis. Dalam konteks Indonesia yang plural dan dialogis, pendekatan yang terlalu menekankan fungsi pemurnian ajaran dapat berisiko mengurangi ruang dialog dan mempersempit kemungkinan perjumpaan teologis lintas tradisi.

Pertanyaan kedua berkaitan dengan fungsi kredo dalam mencari konsensus atau memperluas wawasan teologis. Dalam perkembangan gerakan ekumenis modern, kredo Nicea-Konstantinopel sering dipahami sebagai simbol kesatuan iman yang dapat menjadi titik temu bagi berbagai tradisi Kristen. Studi-studi yang dikembangkan dalam kerangka gerakan Faith and Order menunjukkan bahwa pengakuan iman tidak harus dipahami secara eksklusif sebagai alat pembatas, tetapi dapat menjadi dasar dialog teologis yang membuka ruang bagi pemahaman yang lebih luas tentang

Yusak Soleiman

Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dan Dinamika Penerimaannya

kesatuan gereja. Dalam perspektif ini, kredo berfungsi sebagai memori teologis bersama yang memungkinkan gereja-gereja dengan latar belakang berbeda untuk menemukan dasar kesatuan tanpa harus menghapus perbedaan. Pendekatan seperti ini relevan bagi gereja-gereja di Indonesia yang berada dalam konteks ekumenis dan interdenominasi yang dinamis, di mana pengakuan iman dapat menjadi sarana untuk membangun kesadaran akan kesatuan dalam keragaman.

Pertanyaan ketiga menyentuh relasi antara pengakuan iman dan kekuasaan, baik dalam bentuk politik, finansial, maupun budaya. Sejarah kredo Nicea-Konstantinopel menunjukkan bahwa pembentukan ortodoksi tidak pernah sepenuhnya terlepas dari dukungan kekuasaan politik dan institusional. Dalam konteks Kekaisaran Romawi, konsili-konsili ekumenis berfungsi sebagai sarana untuk menstabilkan kesatuan gereja sekaligus menjaga stabilitas kekaisaran. Dalam konteks kolonial dan misi, kredo juga menjadi bagian dari sistem teologi yang dibawa oleh gereja Barat ke berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana pengakuan iman berfungsi sebagai ekspresi iman yang autentik dan sejauh mana ia menjadi instrumen dominasi teologis yang membentuk struktur gereja global.

Dalam konteks gereja-gereja di Indonesia, refleksi terhadap relasi antara kredo dan kekuasaan menjadi semakin penting karena sejarah Kekristenan di Indonesia tidak terlepas dari pengalaman kolonial dan misi Barat. Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel diwariskan sebagai bagian dari sistem teologi yang telah mapan, tetapi proses apropriasi lokal terhadap kredo tersebut belum selalu diiringi dengan refleksi kritis mengenai makna historis dan teologisnya. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menafsirkan kembali kredo Nicea-Konstantinopel dalam kerangka teologi kontekstual yang lebih dialogis dan reflektif, tanpa kehilangan kontinuitas dengan tradisi gereja universal.

Refleksi teologis ini tidak dimaksudkan untuk mereduksi atau menolak signifikansi kredo Nicea-Konstantinopel, melainkan untuk membuka ruang bagi pemahaman yang lebih kritis dan kontekstual terhadap warisan doktrinal gereja. Pengakuan iman dapat tetap berfungsi sebagai simbol kesatuan iman, tetapi sekaligus menjadi sarana untuk membangun dialog teologis yang lebih inklusif dan kontekstual dalam kehidupan gereja di Indonesia. Dengan demikian, kredo Nicea-Konstantinopel tidak hanya dipahami sebagai dokumen masa lalu, tetapi sebagai sumber refleksi teologis yang hidup dalam dinamika Kekristenan kontemporer.

Praktik Kontemporer: Studi Kasus Perayaan 75 Tahun DGI/PGI di Jakarta dan Jayapura

Dinamika penerimaan Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dalam konteks gereja-gereja di Indonesia tidak hanya dapat dilihat melalui dokumen tata gereja dan keputusan sinodal, tetapi juga melalui praktik liturgis kontemporer. Praktik ibadah sering kali menjadi indikator yang lebih konkret mengenai bagaimana suatu kredo difungsikan dalam kehidupan gereja. Dalam konteks ini, perayaan ulang tahun ke-75 Dewan Gereja di Indonesia/Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (DGI/PGI) tahun 2025 memberikan contoh yang menarik mengenai variasi penerimaan Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dalam praktik ekumenis gereja-gereja di Indonesia.

Perayaan yang diselenggarakan di Jakarta (31 Mei 2025) menunjukkan bahwa pembacaan pengakuan iman tidak selalu menjadi bagian yang eksplisit dalam liturgi ekumenis. Dalam ibadah tersebut, fokus liturgi lebih diarahkan pada doa, khotbah, dan refleksi sejarah gereja di Indonesia, tanpa pembacaan bersama Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel atau pengakuan iman ekumenis lainnya. Situasi ini memperlihatkan bahwa dalam praktik kontemporer, pengakuan iman tidak selalu diposisikan sebagai elemen wajib dalam setiap perayaan gerejawi, bahkan dalam konteks ekumenis nasional. Ketidadaan pembacaan kredo dalam ibadah tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk fleksibilitas liturgis yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan perayaan dan konteks jemaat yang beragam.

Yusak Soleiman

Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dan Dinamika Penerimaannya

Sebaliknya, perayaan yang diselenggarakan di Jayapura (25 Mei 2025) menunjukkan pola yang berbeda. Dalam ibadah tersebut, Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dibacakan secara bersama-sama sebagai bagian dari liturgi ekumenis, yang menegaskan dimensi kesatuan iman gereja-gereja di Indonesia dalam kerangka tradisi gereja universal. Pembacaan kredo dalam ibadah ini tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan iman, tetapi juga sebagai simbol kesatuan gereja dalam perayaan bersama yang melibatkan berbagai denominasi dan tradisi gerejawi. Praktik ini menunjukkan bahwa kredo Nicea-Konstantinopel masih memiliki fungsi liturgis dan simbolis yang kuat dalam konteks ekumenis tertentu.

Perbedaan antara dua praktik ibadah tersebut menunjukkan bahwa penerimaan kredo Nicea-Konstantinopel dalam konteks Indonesia tidak bersifat seragam, melainkan kontekstual dan situasional. Dalam beberapa konteks, kredo berfungsi sebagai simbol kesatuan iman yang diungkapkan secara liturgis, sementara dalam konteks lain ia tidak menjadi elemen utama dalam perayaan gerejawi. Variasi ini mencerminkan karakter ekumenis gereja-gereja di Indonesia yang cenderung fleksibel dan terbuka terhadap berbagai bentuk ekspresi iman, tanpa harus selalu menempatkan pengakuan iman sebagai pusat liturgi.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa kredo Nicea-Konstantinopel tidak hanya hidup dalam dokumen teologis atau tata gereja, tetapi juga dalam praktik liturgis yang konkret dan kontekstual. Penggunaan atau ketiadaan pembacaan kredo dalam ibadah ekumenis mencerminkan bagaimana gereja-gereja di Indonesia menafsirkan fungsi pengakuan iman dalam kehidupan bersama. Dalam konteks tertentu, kredo menjadi sarana untuk menegaskan kesatuan iman; dalam konteks lain, ia dapat dikesampingkan demi memberi ruang bagi bentuk ekspresi iman yang lebih inklusif dan kontekstual.

Secara teologis, praktik ini memperlihatkan bahwa penerimaan Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel di Indonesia tidak hanya berlangsung pada level dokumen dan institusi, tetapi juga pada level praktik dan pengalaman liturgis komunitas. Kredo tidak selalu hadir sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai salah satu kemungkinan ekspresi iman dalam kehidupan gereja. Hal ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa penerimaan kredo di Indonesia cenderung bersifat fleksibel, kontekstual, dan dipengaruhi oleh kebutuhan pastoral serta dinamika ekumenis.

Dengan demikian, contoh praktik perayaan 75 tahun DGI/PGI di Jakarta dan Jayapura memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana kredo Nicea-Konstantinopel difungsikan dalam kehidupan gereja kontemporer di Indonesia. Variasi praktik tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kredo tetap memiliki relevansi sebagai simbol kesatuan iman, tetapi tidak selalu menjadi elemen yang harus dihadirkan secara seragam dalam setiap perayaan gerejawi.

Diskursus Ekumenis dan Arah Teologi Pengakuan Iman

Perkembangan dinamika penerimaan Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dalam Kekristenan global dan dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari diskursus ekumenis yang berkembang sejak abad kedua puluh. Gerakan ekumenis internasional menempatkan pengakuan iman sebagai salah satu titik temu bagi gereja-gereja yang berbeda tradisi, sekaligus sebagai ruang refleksi kritis terhadap sejarah doktrin dan relasi kekuasaan dalam Kekristenan. Dalam kerangka ini, kredo Nicea-Konstantinopel tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen pemurnian ajaran, tetapi sebagai warisan teologis bersama yang dapat menjadi dasar dialog lintas tradisi gerejawi.

Pengakuan iman ekumenis memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai simbol kesatuan iman dan sebagai sarana untuk membangun pemahaman bersama dalam keragaman tradisi Kristen. Pendekatan ini menekankan bahwa kesatuan gereja tidak harus diwujudkan dalam keseragaman doktrin yang kaku, melainkan dalam pengakuan bersama terhadap iman dasar yang diwarisi dari

Yusak Soleiman

Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dan Dinamika Penerimaannya

gereja awal. Dalam konteks ini, kredo Nicea-Konstantinopel dipahami sebagai bagian dari memori teologis bersama yang memungkinkan gereja-gereja untuk berdialog mengenai perbedaan doktrinal tanpa kehilangan dasar kesatuan iman. Perspektif ini membuka ruang bagi pendekatan yang lebih dialogis terhadap pengakuan iman, di mana kredo berfungsi sebagai jembatan teologis, bukan sebagai alat eksklusi.

Dalam perkembangan ekumenis kontemporer, lembaga-lembaga seperti *World Council of Churches*, *Lutheran World Federation* (LWF), dan *World Communion of Reformed Churches* (WCRC) secara konsisten mendorong gereja-gereja untuk meninjau kembali warisan doktrinal dalam kerangka dialog dan rekonsiliasi. Pengakuan iman dipahami sebagai bagian dari tradisi gereja yang harus dibaca dalam konteks sejarahnya, termasuk dalam relasinya dengan kekuasaan politik dan kolonial. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk meruntuhkan ortodoksi, tetapi untuk memahami bagaimana doktrin berkembang dalam sejarah dan bagaimana ia dapat diappropriasi secara kontekstual dalam situasi gereja masa kini. Dengan demikian, diskursus ekumenis mendorong gereja-gereja untuk melihat kredo Nicea-Konstantinopel sebagai sumber refleksi teologis yang hidup, bukan sebagai dokumen yang tertutup terhadap reinterpretasi.

Dalam konteks Indonesia, diskursus ini menjadi relevan karena gereja-gereja di Indonesia merupakan bagian dari kesatuan kekristenan global yang mewarisi tradisi teologi Barat, sekaligus hidup dalam realitas pluralisme agama dan budaya. Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel, yang secara historis lahir dalam konteks kekaisaran Romawi dan kemudian diwariskan melalui tradisi gereja Barat, perlu ditafsirkan kembali dalam kerangka teologi kontekstual yang memperhatikan realitas lokal. Hal ini tidak berarti menolak kredo sebagai warisan teologis, tetapi menempatkannya dalam dialog dengan pengalaman iman gereja-gereja di Indonesia yang hidup dalam masyarakat multikultural dan multireligius.

Pertanyaan yang muncul dalam diskursus ini adalah apakah gereja-gereja Barat, termasuk gereja-gereja yang memiliki hubungan sejarah dengan gereja-gereja di Indonesia, perlu melakukan refleksi kritis terhadap dominasi teologis yang terjadi dalam sejarah Kekristenan. Sejarah menunjukkan bahwa pembentukan ortodoksi sering kali diiringi oleh marginalisasi terhadap komunitas Kristen yang tidak berada dalam arus utama Nicea-Konstantinopel, seperti gereja-gereja non-Chalcedonian dan tradisi Kristen Timur lainnya. Dalam konteks kolonial, dominasi teologi Barat juga memengaruhi struktur gereja dan sistem doktrin di berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, muncul pertanyaan teologis mengenai kemungkinan rekonsiliasi dan pengakuan historis terhadap pengalaman marginalisasi tersebut.

Diskursus mengenai rekonsiliasi ini tidak harus dipahami sebagai tuntutan moral semata, tetapi sebagai bagian dari proses pematangan teologi ekumenis. Gereja-gereja Barat dan gereja-gereja global dapat bersama-sama meninjau kembali sejarah penerimaan kredo Nicea-Konstantinopel untuk memahami bagaimana doktrin tersebut berkembang dalam relasi dengan kekuasaan dan bagaimana ia dapat diappropriasi secara lebih inklusif dalam konteks Kekristenan kontemporer. Pendekatan ini sejalan dengan semangat ekumenis yang menekankan dialog, rekonsiliasi, dan kesatuan dalam keragaman sebagai bagian dari panggilan gereja di dunia modern.

Dengan demikian, arah teologi pengakuan iman dalam konteks Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pelestarian warisan doktrinal, tetapi juga dengan kemampuan gereja untuk menafsirkan kembali kredo Nicea-Konstantinopel dalam kerangka dialog global dan kontekstual. Pengakuan iman dapat tetap berfungsi sebagai simbol kesatuan iman, tetapi sekaligus menjadi ruang refleksi kritis terhadap sejarah doktrin dan relasi kekuasaan dalam Kekristenan. Pendekatan ini memungkinkan gereja-gereja di Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskursus teologi global, tanpa kehilangan identitas kontekstualnya. Diskursus ekumenis ini pada akhirnya mengarah pada kebutuhan untuk merumuskan kembali posisi teologis gereja-gereja di Indonesia

terhadap Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel, baik sebagai warisan historis maupun sebagai sumber refleksi teologis kontemporer.

PENUTUP

Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel (325–381) merupakan salah satu formulasi doktrinal paling berpengaruh dalam sejarah Kekristenan yang tidak hanya lahir dari kontroversi teologis abad keempat, tetapi juga berkembang melalui proses penerimaan historis yang panjang dalam berbagai konteks gerejawi. Kajian ini menunjukkan bahwa kredo Nicea-Konstantinopel tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dokumen doktrinal yang statis, melainkan sebagai konstruksi historis yang terbentuk melalui interaksi antara refleksi teologis, dinamika kekuasaan politik, dan kebutuhan akan kesatuan gereja. Sejak Konsili Nicea hingga Konsili Konstantinopel, kredo ini mengalami proses konsolidasi ortodoksi yang berkelanjutan, sekaligus menunjukkan bahwa pembentukan doktrin selalu berlangsung dalam konteks sejarah yang kompleks dan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan.

Dalam perkembangan Kekristenan global, kredo Nicea-Konstantinopel berfungsi sebagai simbol kesatuan iman sekaligus sebagai ruang kontestasi teologis. Penerimaannya tidak berlangsung secara seragam, tetapi dipengaruhi oleh konteks gereja Timur dan Barat, perbedaan tradisi teologis, serta relasi antara ortodoksi dan komunitas-komunitas Kristen yang berada di luar arus utama Nicea. Transformasi kredo dari dokumen konsili menjadi teks liturgis dan simbol identitas iman menunjukkan bahwa pengakuan iman tidak hanya memiliki fungsi teologis, tetapi juga fungsi eklesiologis dan kultural dalam membentuk memori historis gereja.

Dalam konteks Indonesia, kajian ini menemukan bahwa penerimaan kredo Nicea-Konstantinopel berlangsung terutama melalui transmisi institusional dalam tradisi Gereformeerd dan jaringan misi Barat sejak era VOC hingga pembentukan gereja-gereja nasional pada abad kedua puluh. Dokumen tata gereja awal menunjukkan bahwa kredo diakui sebagai bagian dari warisan gereja universal, tetapi tidak selalu menjadi objek refleksi teologis yang eksplisit dalam persidangan sinode awal. Prioritas gereja-gereja muda lebih diarahkan pada konsolidasi organisasi, tata ibadah, pendidikan iman, dan stabilisasi komunitas, sehingga pengakuan iman berfungsi terutama sebagai simbol kontinuitas historis dan identitas gerejawi yang diwarisi dari tradisi sebelumnya. Praktik kontemporer, seperti yang terlihat dalam perayaan 75 tahun DGI/PGI di Jakarta dan Jayapura, semakin menegaskan bahwa penerimaan kredo di Indonesia bersifat fleksibel dan kontekstual, di mana kredo dapat berfungsi sebagai simbol kesatuan iman dalam konteks tertentu, tetapi tidak selalu menjadi elemen wajib dalam setiap praktik liturgis.

Temuan ini menunjukkan bahwa gereja-gereja di Indonesia dihadapkan pada tantangan teologis dan eklesiologis untuk menafsirkan kembali Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dalam kerangka teologi kontekstual dan dialog ekumenis. Kredo tidak perlu dipahami secara eksklusif sebagai pagar doktrinal yang kaku, tetapi sebagai warisan teologis yang dapat menjadi dasar refleksi kritis dan dialog lintas tradisi dalam Kekristenan global. Dalam kerangka ini, gereja-gereja di Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan apropriasi teologis yang lebih dialogis terhadap kredo Nicea-Konstantinopel, sehingga ia tidak hanya berfungsi sebagai simbol historis, tetapi juga sebagai sumber refleksi iman yang hidup dalam konteks pluralisme dan perkembangan teologi kontemporer.

Dengan demikian, peninjauan kembali terhadap Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel bukan dimaksudkan untuk mereduksi signifikansi teologisnya, melainkan untuk memperkuat pemahaman gereja terhadap warisan doktrinal dalam konteks sejarah dan realitas kekinian. Melalui pendekatan historis-teologis dan perspektif sejarah penerimaan, kredo Nicea-Konstantinopel dapat dipahami sebagai bagian dari tradisi gereja yang dinamis dan terbuka terhadap dialog, yang

Yusak Soleiman

Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dan Dinamika Penerimaannya

pada akhirnya memungkinkan gereja-gereja di Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskursus teologi global tanpa kehilangan identitas kontekstualnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Jan S., & Karel A. Steenbrink, eds. *A History of Christianity in Indonesia*. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2008.
- Brès, Guido de. *Pengakuan Iman Belanda* (1561).
- Edwards, Mark. "The First Council of Nicaea and the Making of Nicene Christianity." In *The Cambridge History of Christianity, Volume 1: Origins to Constantine*, edited by Margaret M. Mitchell and Frances M. Young. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Meyendorff, John. *Imperial Unity and Christian Divisions: The Church 450–680 A.D.* Crestwood, NY: St Vladimir's Seminary Press, 1989.
- Proto-synode GPIB. *Tata Gereja 1948*, bijlage VI
- Schaff, Philip, & Henry Wace, eds. *Nicene and Post Nicene Fathers, Second Series, Vol. 4*.
- Siecienski, A. Edward. *The Filioque: History of a Doctrinal Controversy*. Oxford Studies in Historical Theology. New York: Oxford University Press, 2010.
- Sinode Gereja Toraja. Sidang Sinode I (1947) dan Sidang Sinode IV (1953).
- Walls, Andrew F. *The Missionary Movement in Christian History: Studies in the Transmission of Faith*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1996.
- Kateksimus Heidelberg* (1563).
- Doktrin Dordrecht* (Sinode Dordrecht, 1618–1619).